

## **BAB 3**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **3.1. Visi dan Misi DJP**

Dalam buku Rencana Strategis DJP 2008-2012 (DJP, 2008) dijelaskan dengan tegas apa yang menjadi visi dan misi DJP sebagai organisasi sektor publik yaitu :

- Visi  
Menjadi institusi Pemerintah yang menyelenggarakan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang Efektif, Efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan Profesionalisme yang tinggi
- Misi  
Menghimpun penerimaan Pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi yang efektif dan efisien.

Dari visi dan misi tersebut, kita bisa melihat ada penegasan dan penyederhanaan jika dibandingkan dengan visi dan misi sebelumnya yang terbagi-bagi dalam 4 bagian (Misi Fiskal, Misi Ekonomi, Misi Politik, Misi Kelembagaan). Misi di DJP saat ini lebih jelas dan tegas menekankan peran DJP dalam menghimpun penerimaan Negara dari sektor Pajak demi kemandirian pembiayaan APBN.

#### **3.2. Gambaran Penilaian Kinerja di DJP**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi di bawah Departemen Keuangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut, DJP menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain 1) penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perpajakan, 2) pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, 3) penyusunan

standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan, 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan, dan 5) pelaksanaan administrasi di bidang perpajakan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sarana untuk evaluasi kinerja, setiap instansi yang berada dibawah DJP wajib menyampaikan laporan kinerja dalam setiap periode yang telah berjalan. Terdapat 2 bentuk laporan penilaian kinerja di DJP yaitu LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan KPI (*Key Performance Indicator*).

LAKIP merupakan metode evaluasi akuntabilitas yang secara umum diterapkan di seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. LAKIP berisi serangkaian kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah (BPKP, 2002). Rangkaian sistem pertanggungjawaban atau yang lebih dikenal sebagai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah), dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja (Renja) dan dipertanggungjawabkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan buku Pedoman Evaluasi LAKIP, tujuan dari evaluasi ini adalah :

1. Memberikan analisis kritis dan penilaian terhadap implementasi SAKIP
2. Untuk memberikan rekomendasi konstruktif terhadap SAKIP
3. Memberikan rekomendasi yang penting guna peningkatan kinerja organisasi dan peningkatan akuntabilitasnya.

Secara garis besar kegiatan dalam evaluasi LAKIP ini terbagi dalam 3 hal pokok yaitu :

1. Evaluasi terhadap implementasi SAKIP

Evaluasi SAKIP dilakukan dengan menelaah, menganalisis, dan menyimpulkan setiap elemen dalam SAKIP yaitu meliputi :

- a. Penelaahan Renstra
- b. Penelaahan Sistem Pengukuran Kinerja (SPK)
- c. Penilaian kehandalan dalam LAKIP

## 2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Kinerja dilakukan dengan menelaah, menganalisis, menguji, dan menyimpulkan capaian-capaian kinerja meliputi :

- a. Capaian kinerja, program, kegiatan, dan sasaran yang tercantum dalam LAK
- b. Capaian kinerja/keberhasilan program utama

## 3. Evaluasi atas Kinerja Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan

Evaluasi ini menguraikan hasil pengujian atas kinerja keuangan yang meliputi penyajian anggaran, pembiayaan kegiatan, kinerja keuangan, dan pelaporan keuangan yang disajikan dalam LAK dibandingkan dengan data/dokumen pendukung keuangan serta pengujian terhadap ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan LAKIP, penilaian kinerja berdasarkan KPI (*Key Performance Indicator*) merupakan kebijakan yang dibuat khusus oleh DJP melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006 tanggal 27 Juli 2006. KPI tersebut merupakan indikator kinerja yang berisi rasio-rasio kinerja. Pada tahun 2008, penghitungan KPI di KPP Pratama Jakarta Tebet adalah sebagai berikut:

- Rasio ekstensifikasi WP OP, yaitu besarnya rasio antara WP OP terdaftar terhadap perkiraan jumlah keluarga tidak miskin. Pada tahun 2008, rasio ini menunjukkan angka sebesar 53,95%, yang artinya dari seluruh keluarga tidak miskin di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tebet, sebanyak 53,95% telah terdaftar sebagai WP Orang Pribadi di KPP tersebut.
- *Coverage Ratio* PBB, yaitu besarnya rasio antara luas Bumi yang telah dikenakan pajak terhadap luas Bumi yang seharusnya dikenakan pajak. Pada tahun 2008, rasio ini menunjukkan angka sebesar 88,96%, yang artinya dari total luas Bumi yang seharusnya kena pajak, sebesar 88,96% telah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Penyampaian SPT Tahunan PPh, yaitu besarnya rasio antara SPT Tahunan PPh OP/Badan terhadap WP OP/Badan terdaftar. Pada tahun 2008, rasio ini menunjukkan angka sebesar 36,89%, dimana angka tersebut

merupakan rata-rata dari rasio penyampaian SPT Tahunan PPh OP sebesar 50,36%, dengan rasio penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebesar 21,38%. Rasio rata-rata tersebut menunjukkan bahwa dari total WP terdaftar (baik OP maupun Badan), yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh adalah sebesar 36,89%.

- Penyampaian SPT Masa PPN, yaitu besarnya rasio antara rata-rata penyampaian SPT masa PPN tiap bulan terhadap jumlah PKP terdaftar. Pada tahun 2008, rasio ini menunjukkan angka sebesar 39,52%, yang artinya dari total PKP terdaftar, sebanyak 39,52% telah menyampaikan SPT masa PPN.
- Kepatuhan Pelunasan PBB, yaitu besarnya rasio antara SPPT yang telah dilunasi terhadap SPPT yang diterbitkan. Pada tahun 2008, rasio ini menunjukkan angka sebesar 62,26%, yang artinya dari total SPPT yang diterbitkan, sebesar 62,26% yang telah dilunasi oleh WP.
- *Assesment Sales Ratio*, yaitu besarnya rasio antara NJOP PBB yang sudah ditetapkan terhadap harga pasar. Pada tahun 2008, rasio ini menunjukkan angka sebesar 85,10%, yang artinya NJOP PBB yang telah ditetapkan adalah sebesar 85,1% dari nilai pasar yang sesungguhnya.
- Efisiensi Pemeriksaan, yaitu besarnya rasio antara jumlah pemeriksaan selesai dengan jumlah pemeriksa. Pada tahun 2008, rasio ini menunjukkan angka sebesar 10,13, yang artinya rata-rata tiap pemeriksa mampu menyelesaikan 10,13 berkas pemeriksaan pada tahun 2008.
- Efisiensi Keberatan, yaitu besarnya rasio antara jumlah waktu penyelesaian keberatan terhadap jumlah keputusan keberatan. Rasio ini tidak dapat dihitung karena berkas penyelesaian keberatan mulai tahun 2008 telah dipindahkan penyelesaiannya ke Bagian Keberatan dan Banding di Kantor Wilayah masing-masing.
- Efisiensi Pengurangan Keberatan PBB dan BPHTB, yaitu besarnya rasio antara jumlah waktu penyelesaian pengurangan PBB dan BPHTB terhadap jumlah keputusan pengurangan. Pada tahun 2008, rasio ini menunjukkan angka sebesar 0,61, artinya waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk

menyelesaikan satu berkas pengurangan PBB dan BPHTB adalah 0,61 bulan.

- Efisiensi Penyelesaian Restitusi, yaitu besarnya rasio antara jumlah waktu penyelesaian restitusi terhadap jumlah SKP yang diterbitkan. Pada tahun 2008, Efisiensi Penyelesaian Restitusi PPh adalah sebesar 8,74. Sedangkan Efisiensi Penyelesaian Restitusi PPN dan PPnBM adalah sebesar 4,65. Artinya waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 berkas restitusi PPh adalah 8,74 bulan, sedangkan untuk restitusi PPN dan PPnBM adalah sebesar 4,65 bulan.
- Efisiensi Pencairan Tunggakan, yaitu besarnya rasio antara jumlah pencairan tunggakan terhadap saldo awal tunggakan. Pada tahun 2008, rasio ini menunjukkan angka sebesar 42,8%, yang artinya dalam setahun KPP Pratama Jakarta Tebet mampu menyelesaikan 42,8% saldo awal tunggakan.
- *Collection Ratio* Pencairan Ketetapan PBB, yaitu besarnya rasio antara realisasi penerimaan PBB terhadap Pokok Ketetapan Tahun Berjalan. Pada tahun 2008, rasio ini menunjukkan angka sebesar 80,6%, artinya dari total Pokok Ketetapan PBB yang telah ditetapkan, sebanyak 80,6% telah berhasil dicairkan.
- *Collection Ratio* Pencairan tunggakan PBB dan BPHTB, yaitu besarnya rasio antara realisasi pencairan tunggakan terhadap Pokok tunggakan. Pada tahun 2008, rasio ini menunjukkan angka sebesar 15,49%, artinya dari total pokok tunggakan PBB dan BPHTB yang ada, sebesar 15,49% telah berhasil dicairkan.
- Rasio Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak, yaitu besarnya rasio antara jumlah permohonan keberatan terhadap jumlah SKP yang diterbitkan. Dalam rasio ini hanya terdapat 3 rasio yaitu : Rasio Keberatan PPh Badan sebesar 8,89%, Rasio Keberatan PPN dan PPnBM sebesar 12,62%, dan Rasio Keberatan PBB sebesar 0,04%.

Data KPI tersebut dilaporkan minimal 2 kali dalam setahun (tiap akhir semester) kepada Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan yang secara teknis bertugas menyimpan dan mengelola hasil KPI untuk tiap instansi di DJP.

Apabila kita melihat kedua penilaian kinerja diatas, yang menjadi fokus dari penilaian kinerja DJP adalah sisi finansial dan proses internal organisasi. LAKIP yang menilai akuntabilitas, memfokuskan pada sisi finansial yang telah dilakukan dalam satu periode. Sedangkan KPI yang berisi rasio-rasio pencapaian kinerja instansi, lebih memfokuskan pada proses internal organisasi dalam memenuhi target yang ditetapkan.

### **3.3. Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Tebet**

Secara organisatoris, KPP Pratama Jakarta Tebet berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Sedangkan Kanwil DJP Jakarta Selatan membawahi 13 KPP yaitu : KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu, Dua, dan Tiga, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, Dua, dan Tiga, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, KPP Pratama Jakarta Pancoran, KPP Pratama Jakarta Tebet, KPP Pratama Jakarta Cilandak, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, dan KPP Madya Jakarta Selatan.

Wilayah administrasi pajak KPP Pratama Jakarta Tebet itu sendiri meliputi seluruh wilayah di kecamatan Tebet Jakarta Selatan yang terdiri atas 7 kelurahan yaitu : 1) Kelurahan Menteng Dalam, 2) Kelurahan Tebet Barat, 3) Kelurahan Manggarai, 4) Kelurahan Tebet Timur, 5) Kelurahan Bukit Duri, 6) Kelurahan Kebon Baru, dan 7) Kelurahan Manggarai Selatan.

#### **3.2.1. Profil SDM**

Sumber daya manusia yang terdapat pada KPP Pratama Jakarta Tebet terbagi ke dalam 14 bagian yang terdiri dari 10 bagian struktural dan 4 kelompok fungsional. Distribusi pegawai tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.  
Distribusi SDM berdasarkan Bagian

No	Bagian	Jumlah Pegawai
1	Umum	10
2	Pengolahan Data dan Informasi	10
3	Pemeriksaan	8
4	Pelayanan	15
5	Penagihan	8
6	Ekstensifikasi	7
7	Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) 1	9
8	Waskon 2	9
9	Waskon 3	9
10	Waskon 4	9
11	Fungsional Kelompok I	4
12	Fungsional Kelompok II	3
13	Fungsional Kelompok III	3
14	Fungsional Penilai PBB	2
	<b>TOTAL</b>	<b>106</b>

Sumber : Subbag Umum KPP Pratama Jakarta Tebet

Pembagian tugas pelayanan dan konsultasi untuk masing-masing seksi Waskon dibagi berdasarkan wilayah kelurahan yang ada yaitu :

- Waskon 1 : Menteng Dalam
- Waskon 2 : Tebet Barat dan Manggarai
- Waskon 3 : Tebet Timur dan Bukit Duri
- Waskon 4 : Kebon Baru dan Manggarai Selatan + Pemungut

Dalam setiap Waskon, terdiri atas 4-6 orang AR yang bertugas memberikan pelayanan, dan pembinaan pajak kepada WP yang terdapat dalam lingkup wilayah mereka.

Berdasarkan latar belakang pendidikan, distribusi Sumber Daya Manusia pada KPP Pratama Jakarta Tebet tergambar pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.

## Distribusi SDM berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S 3	2
2	S 2	6
3	S 1	29
4	D IV	4
5	D III	13
6	D I	14
7	SMA	35
8	SMP	2
9	SD	1
	<b>TOTAL</b>	106

Sumber : Subbag Umum KPP Pratama Jakarta Tebet

Mayoritas pegawai pada KPP Pratama Jakarta Tebet adalah lulusan SMA (35 orang), kemudian pegawai lulusan S1/DIV yaitu sebanyak 33 orang.

Sedangkan berdasarkan fungsi dan jabatan, distribusi pegawai KPP Pratama Jakarta Tebet digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.

## Distribusi SDM berdasarkan Jabatan

No	Bagian	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Seksi	10
3	Supervisor	3
4	<i>Account Representative</i> (Waskon)	19
5	Fungsional	7
6	Pelaksana	56
7	Juru Sita	4
8	Operator Console (OC)	2
9	Sekretaris	2
10	Bendahara	2
	<b>TOTAL</b>	106

Sumber : Subbag Umum KPP Pratama Jakarta Tebet

Dari 19 orang AR yang terdapat dalam KPP Pratama Jakarta Tebet, terbagi ke dalam 4 seksi Pengawasan dan Konsultasi (waskon) yaitu 5 orang pada Seksi Waskon I, 5 orang pada Seksi Waskon 2, 3 orang AR pada Seksi Waskon III



(karena belum ada pengganti atas 2 AR yang pindah), dan 6 orang AR pada Seksi Waskon IV.

Secara umum statistik AR yang ada di KPP Pratama Jakarta Tebet adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Data statistik AR KPP Pratama Jakarta Tebet

Kriteria		Jumlah	Prosentase
Latar Belakang Pendidikan	D3	3	16%
	S1/ D4	16	84%
	S2	-	
	>S2	-	
Sudah pernah Diklat AR	Ya	5	26%
	Tidak	14	74%
Pangkat	II/d	1	5%
	III/a	9	47%
	III/b	7	37%
	>III/b	2	11%

Sumber : Subbag Umum KPP Pratama Jakarta Tebet

### 3.2.2. Penerimaan dan Target

Penerimaan dan target yang diberikan kepada KPP Pratama Jakarta Tebet pada tahun 2007 dan 2008 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sejak diterapkannya SAM, sebanyak 88 WP terbesar dari KPP Pratama Jakarta Tebet, dipindahkan administrasi pajaknya ke KPP Madya Jakarta Selatan. Hal tersebut sangat berpengaruh pada tingkat penerimaan dan target pajak seperti yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5.

Penerimaan dan Target Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2006	1.200.281.870.000	1.188.190.955.235	98,99
2007	851.985.990.000	672.007.919.351	78.91
2008	875.939.040.000	924.376.847.356	105,55

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tebet

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa baru pada tahun 2008 KPP Pratama Jakarta Tebet dapat melampaui target pajaknya sebesar 106.55%.

Jika kita melihat dari realisasi penerimaan dan target pajak tiap KPP di wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan, maka posisi KPP Pratama Tebet adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.

## Penerimaan dan Target KPP di Kanwil DJP Jakarta Selatan

(dalam jutaan rupiah)

No	NAMA KPP	2006			2007			2008		
		Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase
1	KPP JAKARTA SETIABUDI SATU	3,466,071	3,039,412	87.7%	898,344	511,017	56.9%	677,204	898,577	132.69%
2	KPP JAKARTA SETIABUDI DUA	861,621	737,696	85.6%	437,599	330,289	75.5%	439,156	524,255	119.38%
3	KPP JAKARTA SETIABUDI TIGA *				1,011,093	951,915	94.1%	1,255,735	1,626,422	129.52%
4	KPP JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU	2,046,822	1,957,344	95.6%	735,661	531,667	72.3%	677,033	733,658	108.36%
5	KPP JAKARTA KEBAYORAN BARU DUA	518,854	465,906	89.8%	375,795	387,323	103.1%	492,332	484,017	98.31%
6	KPP JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA *				444,297	305,354	68.7%	421,774	406,926	96.48%
7	KPP JAKARTA KEBAYORAN LAMA	990,764	818,964	82.7%	699,084	735,608	105.2%	960,163	1,146,386	119.39%
8	KPP JAKARTA MAMPANG PRAPATAN	780,789	662,705	84.9%	447,862	417,542	93.2%	545,988	955,909	175.08%
9	KPP JAKARTA PANCORAN	579,106	506,117	87.4%	372,203	423,032	113.7%	588,521	613,898	104.31%
10	KPP JAKARTA TEBET	1,200,282	1,188,191	99.0%	851,985	672,007	78.9%	875,939	924,376	105.53%
11	KPP JAKARTA CILANDAK	1,163,295	1,130,120	97.1%	762,641	433,742	56.9%	582,877	631,179	108.29%
12	KPP JAKARTA PASAR MINGGU	1,147,201	824,948	71.9%	498,601	664,581	133.3%	852,036	1,001,007	117.48%
13	KPP MADYA JAKARTA SELATAN *				3,477,045	8,421,766	242.2%	10,553,762	10,945,390	103.71%
14	KPPBB JAKARTA SELATAN SATU **	357,483	317,445	88.8%						
15	KPPBB JAKARTA SELATAN DUA **	328,716	329,492	100.2%						
16	KPPBB JAKARTA SELATAN TIGA **	300,687	252,569	84.0%						
<b>JUMLAH</b>		<b>13,741,691</b>	<b>12,230,909</b>	<b>89.0%</b>	<b>11,012,210</b>	<b>14,785,843</b>	<b>134.3%</b>	<b>18,922,520</b>	<b>20,892,000</b>	<b>110.4%</b>

Sumber : Data dan Informasi Kanwil DJP Jakarta Selatan.

Keterangan :

\* KPP Baru yang terbentuk setelah pemberlakuan SAM

\*\* KPPBB yang dihapus setelah pemberlakuan SAM

Beberapa hal yang patut menjadi catatan dalam tabel diatas adalah pada tahun 2006, KPP Jakarta Tebet (pada saat itu belum menjadi KPP Pratama) menduduki rangking 1 dalam pencapaian target pajaknya mengalahkan KPP lainnya (tidak termasuk KPPBB) dengan prosentase mencapai 99%. Namun demikian, sejak diberlakukannya SAM pada pertengahan tahun 2007, terjadi penurunan drastis dalam hal penerimaan pajak untuk tiap KPP karena WP terbesar dari tiap-tiap KPP dipindahkan ke KPP Madya Jakarta Selatan. Hal tersebut ternyata mempengaruhi kinerja KPP Pratama Jakarta Tebet yang hanya mampu memenuhi 78,9% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan pada tahun 2007.

Akan tetapi, yang menjadi catatan penting dalam tabel ini adalah bahwa pada tahun 2008 KPP Pratama Jakarta Tebet kembali mampu meningkatkan kinerja finansialnya, bahkan penerimaan pajaknya mampu melebihi target pajak yang ditetapkan yaitu sebesar 105,5%. Dalam 3 tahun terakhir, baru pada tahun 2008 KPP Pratama Jakarta Tebet mampu melampaui target pajaknya.

### 3.2.3. Profil Wajib Pajak

Dari seluruh jumlah WP yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Tebet, mayoritas WP berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yaitu sekitar 69% dari total WP terdaftar. Distribusi Wajib Pajak tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.7.  
Distribusi Wajib Pajak

Jenis WP	Jumlah WP Terdaftar	Prosentase	Jumlah WP Efektif	Prosentase
Badan	14.060	31	13.115	30
Orang Pribadi	31.235	69	30.438	70
Jumlah	45.295	100	43.553	100

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tebet

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa prosentase Wajib Pajak efektif terhadap total wajib pajak terdaftar adalah sebesar 96,1%. Artinya, dari 45.295 WP yang terdaftar, sebesar 96,1% merupakan WP efektif. Berdasarkan SE Dirjen Pajak Nomor SE - 26/PJ.2/1988, yang dimaksud dengan WP Efektif adalah WP yang memenuhi kewajiban pajaknya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa dan atau SPT Tahunan sebagaimana mestinya. Rasio WP efektif sebesar 96,1% tersebut menunjukkan tingkat partisipasi WP yang tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara aktif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, dari jumlah WP terdaftar, terdapat 125 WP yang bestatus sebagai Pemungut dan 5.191 WP yang mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).